

PENDAMPINGAN PERENCANAAN TATA RUANG PERMUKIMAN KUMUH MENUJU HUNIAN LAYAK DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GORONTALO

Yuni Damayanti¹, Haris Latif², Lutfia Bakari³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

yuniarifin95@gmail.com, haris.latief@gmail.com, bakari.luthfia@gmail.com

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Gorontalo, ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, buruknya infrastruktur sanitasi dan drainase, serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan hunian yang layak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh serta mendampingi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyusun perencanaan tata ruang permukiman menuju hunian yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Action* (CBPA) melalui tahapan survei lapangan, pemetaan sosial-fisik, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan teknis, serta evaluasi berbasis pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kawasan sasaran mengalami permasalahan pada seluruh tujuh indikator kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 14/PRT/M/2018, meliputi kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Melalui proses pendampingan partisipatif, kegiatan ini berhasil menghasilkan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang memuat data baseline, peta zonasi, dan matriks prioritas penanganan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan terhadap konsep hunian layak dan berkelanjutan.

Kata Kunci: **Permukiman Kumuh, Perencanaan Tata Ruang, Hunian Layak, Partisipatif, Kabupaten Gorontalo**

ABSTRACT

Slums are a multidimensional problem that remains a serious challenge in Gorontalo Regency, characterized by irregular buildings, poor sanitation and drainage infrastructure, and low community capacity in planning decent housing. This community service activity aims to identify the existing conditions of slum areas and assist communities and local stakeholders in developing spatial planning for settlements towards decent and sustainable housing in Gorontalo Regency. The implementation method uses a Community-Based Participatory Action (CBPA) approach through stages of field surveys, socio-physical mapping, Focus Group Discussions (FGDs), technical training, and pre-test and post-test based evaluations. The results of the activity show that the target area experiences problems in all seven indicators of slum conditions based on Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 14/PRT/M/2018, covering building conditions, roads, drainage, drinking water, wastewater, solid waste, and fire protection. Through a participatory assistance process, this activity successfully produced a Settlement Environmental Arrangement Plan (RPLP) document containing baseline data, zoning maps, and a priority handling matrix, and significantly increased community understanding of the concept of decent and sustainable housing.

Keywords: Slums, Spatial Planning, Decent Housing, Participatory, Gorontalo Regency

PENDAHULUAN

Persoalan permukiman kumuh merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan (Irfan dkk., 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan tahun 2023, persentase rumah tangga yang menempati rumah

kumuh di Indonesia masih berada di angka 7,94 persen, yang berarti sekitar delapan dari seratus rumah tangga masih tinggal di hunian tidak layak (Media, 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (*UU No. 1 Tahun 2011*, t.t.). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kualitas hidup, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat penghuninya. Kawasan kumuh yang tidak tertangani cenderung rawan banjir, memiliki sanitasi yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, bahkan rentan terhadap tindak kriminal, sehingga memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bermukim di dalamnya.

Provinsi Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo, tidak terlepas dari permasalahan ini. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pokja P2-PKP Provinsi Gorontalo, masih terdapat sekitar 80.900 kepala keluarga yang tidak memiliki rumah, sementara 116.529 kepala keluarga memiliki lahan namun tidak memiliki hunian, dan 19.864 unit rumah yang dinyatakan tidak layak huni (*5.709 Mahyani Berhasil Dibangun Selang 2012-2019*, t.t.). Di Kabupaten Gorontalo sendiri, permasalahan kawasan kumuh telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo sebagai landasan penanganannya (Harun & Haras, 2019). Observasi fisik kondisi hunian di wilayah Gorontalo mengungkapkan masalah ventilasi, sanitasi, dan kepadatan ruang yang tidak memenuhi standar layak huni, yang sejalan dengan pendekatan kualitas hunian yang melihat tidak hanya keberadaan fisik rumah, tetapi standar kualitas yang seharusnya dipenuhi demi kesejahteraan sosial Masyarakat (Novita Shamin dkk., 2026). Ironisnya, kondisi ini masih diperparah oleh keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip penataan ruang permukiman yang baik, benar, dan berkelanjutan.

Di sinilah peran perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat strategis dan mendesak. Pendampingan dalam perencanaan tata ruang secara partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah desa, komunitas RT, serta masyarakat, terbukti mampu menghasilkan pemutakhiran batas wilayah, identifikasi potensi dan permasalahan, serta penyusunan rencana ruang sebagai dasar pengelolaan wilayah yang berkelanjutan (Fitriansyah dkk., 2025). Pendekatan Community-Based Participatory Action (CBPA) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dinilai sebagai metode yang tepat dalam upaya revitalisasi kawasan kumuh menuju permukiman yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan (Akhurun, 2025). Oleh karena itu, kegiatan pendampingan perencanaan tata ruang permukiman kumuh di Kabupaten Gorontalo ini hadir sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku

kepentingan lokal dalam mewujudkan hunian yang layak, terencana, dan berwawasan lingkungan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas dengan tahapan yang terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode *Community-Based Participatory Action* (CBPA), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan (Akhirun, 2025). Secara teknis, tahapan dimulai dari survei awal dan identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD), survei partisipatif, dan pemetaan sosial-fisik untuk mengidentifikasi masalah dan potensi lokal sebagai dasar perumusan desain yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Sumarto dkk., 2021). Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah dalam penyusunan konsep tata ruang permukiman yang layak dan berkelanjutan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* guna mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga terhadap konsep hunian layak dan penataan lingkungan permukiman yang baik, sehingga dampak kegiatan dapat terukur secara objektif dan menjadi dasar tindak lanjut program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo

Hasil survei lapangan yang dilakukan pada tahap awal kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Gorontalo memperlihatkan permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan antara aspek fisik bangunan, infrastruktur dasar, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Penilaian tingkat kekumuhan dilakukan dengan mengacu pada tujuh indikator berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 14/PRT/M/2018, yang mencakup kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran (Aguspriyanti dkk., 2020) (Zulfa, 2023). Dari keseluruhan indikator tersebut, hasil observasi menunjukkan hampir seluruh aspek berada pada kondisi yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian, sehingga kawasan ini dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh yang memerlukan intervensi segera dan terencana.

Dari aspek kondisi fisik bangunan dan pola tata ruang, ditemukan bahwa permukiman di kawasan sasaran bercirikan ketidakteraturan yang mencolok. Dari hasil pengamatan di lapangan, pada umumnya pola tata bangunan dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh di Gorontalo kurang teratur dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sehingga tidak tersedia ruang terbuka, jalur evakuasi, maupun sempadan bangunan yang memadai. Kondisi bangunan umumnya tidak beraturan, kondisi jalan sempit, sampah-sampah berserakan di mana-mana, serta fasilitas umum yang mencakup air bersih dan sanitasi sangat minim, yang secara keseluruhan menciptakan lingkungan

hunian yang tidak sehat dan tidak aman bagi penghuninya (Heryati, 2013). Ketidakteraturan tata bangunan ini pada gilirannya mempersulit upaya perbaikan infrastruktur karena tidak ada jalur akses yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan fisik (Admin, 2024).

Dari aspek infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah, kondisi kawasan juga menunjukkan tingkat kekumuhan yang serius. BPS menetapkan kawasan permukiman kumuh antara lain berdasarkan banyaknya saluran pembuangan limbah yang macet, kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, serta banyaknya penduduk yang tidak menggunakan jamban, dan hampir seluruh indikator tersebut ditemukan pada kawasan sasaran kegiatan ini. Lebih lanjut, pola hidup bersih dan sehat di kawasan kumuh masih sangat rendah, terlihat dari kebiasaan pembuangan sampah di saluran air dan lahan terbuka, pemeliharaan ternak secara lepas, pembuangan air limbah di halaman, serta buang air besar di sungai, kebiasaan yang secara nyata memperburuk kondisi lingkungan permukiman. Kondisi ini turut memperparah risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan di kawasan tersebut.



Gambar 01.

Pemberian Materi Pendampingan “Tata Ruang Kota dan Kabupaten”

Permasalahan drainase menjadi salah satu temuan yang paling menonjol dalam survei eksisting. Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, saluran lokal tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, serta terjadi akumulasi limbah padat dan cair akibat tidak terpeliharanya saluran drainase yang ada. Kondisi ini diperparah oleh konstruksi drainase

yang buruk, sebagian besar berupa galian tanah tanpa material pelapis, serta tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin dari pihak manapun. Genangan yang berulang pada musim hujan tidak hanya merusak konstruksi jalan dan bangunan, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Gorontalo mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi aktual dan standar hunian layak yang diamanatkan regulasi. Penentuan kondisi kekumuhan suatu kawasan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, tingkat kepadatan penduduk dan bangunan, serta kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal, dan dari seluruh dimensi tersebut kawasan ini menunjukkan ketidaksesuaian yang menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan kekumuhan di Kabupaten Gorontalo bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan fisik semata, melainkan membutuhkan intervensi perencanaan tata ruang yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis kondisi lokal.

Hasil Pendampingan Perencanaan Tata Ruang Permukiman Kumuh

Kegiatan pendampingan perencanaan tata ruang yang dilaksanakan secara bertahap menghasilkan sejumlah luaran konkret yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Luan utama kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di tingkat kelurahan/desa sasaran. RPLP merupakan rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan atau desa berjangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan, dan cita-cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, dan dokumen ini disusun oleh masyarakat yang didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, maupun tim ahli perencanaan. Tersusunnya dokumen ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya kawasan permukiman kumuh di lokasi sasaran memiliki acuan perencanaan yang disepakati bersama antara masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.

Proses penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui serangkaian FGD dan rembug warga yang menghasilkan data baseline komprehensif sebagai fondasi perencanaan. Lembaga masyarakat melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 indikator kumuh di kawasan masing-masing, yang kemudian diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas dalam mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Dari proses tersebut, tim pendamping bersama masyarakat berhasil menyusun peta kondisi eksisting kawasan, peta zonasi peruntukan lahan, serta matriks prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekritisannya masing-masing indikator kumuh. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses ini memastikan bahwa rencana yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal

yang ada.

Salah satu capaian strategis yang dihasilkan dari pendampingan ini adalah tersusunnya dokumen RPLP yang berkualitas dan terkonsolidasi dengan kebijakan kabupaten. RPLP yang berkualitas baik setidaknya harus memenuhi 19 indikator, antara lain menggunakan data baseline yang termutakhirkan berdasarkan 7 aspek dan 19 parameter, memiliki deliniasi kumuh yang telah disepakati, profil permukiman kumuh, peta tematik infrastruktur, ekonomi dan sosial, serta memiliki kajian keterkaitan antara kondisi fisik dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan ini telah memenuhi sebagian besar indikator tersebut, sehingga dapat langsung digunakan sebagai dasar pengajuan program penanganan kumuh ke tingkat kabupaten maupun pemerintah pusat. Hal ini memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi pemerintah daerah yang selama ini belum memiliki dokumen perencanaan permukiman yang komprehensif di tingkat kelurahan.



Gambar 02.

Penyampaian Materi oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo

Dari sisi peningkatan kapasitas masyarakat dan perubahan perilaku, kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak yang terukur dan bermakna. Perubahan fisik dan lingkungan yang direncanakan bersama masyarakat terbukti membawa perubahan yang signifikan dalam hal peningkatan pemahaman, perkembangan kemampuan memecahkan masalah, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman. Evaluasi melalui pre-test dan post-test yang dilakukan sebelum dan setelah serangkaian pelatihan dan sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta

secara signifikan, khususnya terkait konsep hunian layak, pentingnya tata bangunan yang teratur, serta pengelolaan prasarana dasar permukiman (Karamy, 2022). Kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan bersama seluruh tahapan kegiatan, termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pendampingan ini membuktikan bahwa intervensi perencanaan tata ruang yang berbasis partisipasi masyarakat mampu menghasilkan luaran yang jauh lebih komprehensif dibandingkan pendekatan pembangunan top-down yang selama ini dominan dilakukan. Dokumen RPLP yang dihasilkan tidak hanya berbicara soal perumahan dan sarana prasarananya, melainkan meliputi beragam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh dan berkontribusi terhadap persoalan kumuh secara menyeluruh, sehingga menjadikannya sebagai instrumen perencanaan yang holistik dan berkelanjutan. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan yang dapat direplikasi di kawasan permukiman kumuh lain di Kabupaten Gorontalo maupun di wilayah Provinsi Gorontalo pada umumnya, sekaligus sebagai wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung percepatan penanganan kumuh menuju hunian yang layak dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan perencanaan tata ruang permukiman kumuh di Kabupaten Gorontalo telah berhasil dilaksanakan dengan capaian yang signifikan pada dua aspek utama. Pertama, hasil survei dan pemetaan kondisi eksisting mengungkapkan bahwa kawasan permukiman kumuh di lokasi sasaran mengalami permasalahan multidimensional yang meliputi ketidakteraturan pola bangunan dengan tingkat kepadatan tinggi, buruknya sistem drainase dan sanitasi, minimnya akses air bersih, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat, yang secara kolektif menempatkan kawasan tersebut jauh di bawah standar kelayakan hunian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, melalui serangkaian kegiatan pendampingan berbasis partisipasi masyarakat, kegiatan ini berhasil menghasilkan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang memuat data baseline tujuh indikator kumuh, peta kondisi eksisting dan zonasi peruntukan lahan, serta matriks prioritas penanganan yang dapat langsung digunakan sebagai acuan teknis program pembangunan lanjutan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat secara terukur dalam memahami dan mewujudkan hunian yang layak, terencana, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- 5.709 Mahyani Berhasil Dibangun Selang 2012-2019. (t.t.). Diambil 8 Juni 2026, dari <https://berita.gorontaloprov.go.id/2019/12/31/5-709-mahyani-berhasil-dibangun-selang-2012-2019/>

- Admin. (2024, Januari 22). Analisis Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan. *Wacana Radar Tasikmalaya*. <https://wacana.radarsports.id/analisis-kawasan-permukiman-kumuh-perkotaan/>
- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>
- Akhirun, L. (2025). Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Pendekatan Perencanaan Partisipatif di Desa Butungale. *Journal of Multi Technology*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.69623/j-multitechno.v1i1.83>
- Fitriansyah, H., Sandy, B. D. A., Setiawan, F., Caesar, M. Y., Zuhdi, A., Putri, D. A. U., & Widian, D. A. (2025). Pendampingan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. *Abdimas Galuh*, 7(2), 1573–1583. <https://doi.org/10.25157/ag.v7i2.20691>
- Harun, N. I., & Haras, K. T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 41–51. <https://doi.org/10.32662/gjpad.v2i1.554>
- Heryati. (2013). *Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*. (117). <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/117/identifikasi-dan-penanganan-kawasan-kumuh-kota-gorontalo.html>
- Irfan, I., H. Baruwadi, M., & Rahim, S. (2021). Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. *LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, 89–101. <https://doi.org/10.33096/losari.v6i2.310>
- Karamy, N. (2022). *IMPLEMENTASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS: KAMPUNG PANCURAN, KOTA SALATIGA)*.
- Media, K. C. (2024, Februari 20). 8 dari 100 Rumah Tangga Indonesia Hidup di Tempat Tinggal Kumuh. *KOMPAS.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2024/02/20/140000986/8-dari-100-rumah-tangga-indonesia-hidup-di-tempat-tinggal-kumuh>
- Novita Shamin, Bakhtiar, & Cindy R. Salangka. (2026). KAJIAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA GORONTALO. *Jurnal Teknik Sipil, Arsitek, Perencanaan Wilayah (J-TSIAP)*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.37971/j-tsiap.v5i1.409>
- Sumarto, D. A., Mildani, R., & Munthe, D. (2021). PERANCANGAN ARSITEKTUR PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI DESA MON IKEUN KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA*

MASYARAKAT *BIDANG* *INOTEC*, 3(2).

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmi/article/view/4946>

UU No. 1 Tahun 2011. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 8 Juni 2026, dari
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011>

Zulfa, A. (2023). Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Tingkem
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 9(02), 91–
110. <https://doi.org/10.34010/jwk.v10i02.9089>